

ANALISIS POLA KONSUMSI DAN KEMISKINAN DI JAWA TENGAH

John Jaya Abdillah¹, Vincent Hadi Wiyono², Bhimo Rizky Samudro³

¹Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

²Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

³Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

ukiekndari40@gmail.com

ABSTRAK

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 menjadikan Indonesia menempati sisi yang tersuram dalam perekonomian. Turunnya kemampuan daya beli masyarakat menunjukkan bahwa kondisi ini berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan yang ditunjukkan dengan menurunnya kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia meningkat tajam serta terjadi pergeseran pola konsumsi khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini selain mengkaji bagaimana pola konsumsi di daerah perkotaan dan perdesaan, juga akan melihat bagaimana hubungan antara kemiskinan dengan pola konsumsi masyarakat di Jawa Tengah. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan menghitung nilai uji koefisien korelasi *rank Spearman*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola konsumsi makanan di perkotaan cenderung lebih rendah dibandingkan perdesaan. Berdasarkan hasil uji koefisien korelasi *rank Spearman* menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara persentase penduduk miskin dengan konsumsi perkapita penduduk. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi konsumsi suatu wilayah maka diasumsikan semakin makmur penduduk wilayah tersebut (pendapatan tinggi).

Kata-kata kunci: Kemiskinan, pola konsumsi, *rank spearman*

PENDAHULUAN

Indonesia dengan semua kekayaan alam didalamnya pernah mendapat sebutan sebagai Negara swasembada pangan. Prestasi yang cukup membanggakan bagi sebuah Negara karena telah mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya. Namun krisis ekonomi telah menenggelamkan prestasi yang telah dicapai dalam dua dekade tersebut. Dampak krisis menyebabkan berkurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan kemunduran pembangunan nasional. Kemiskinan yang ditunjukkan dengan berkurangnya pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*) manusia meningkat tajam. Jurang kemiskinan yang ditunjukkan oleh rasio gini semakin terbuka lebar. Munculnya rumahtangga-rumahtangga miskin yang baru juga mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat, baik oleh naiknya harga-harga barang maupun karena faktor lainnya. Kegiatan konsumsi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, apakah itu untuk memenuhi kebutuhan akan makan, pakaian,

hiburan, atau kebutuhan lainnya. Sehingga kemampuan seseorang dalam kegiatan konsumsi akan selalu dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam pemenuhan kebutuhan hidup atau tingkat kesejahteraan. Makin besar pengeluaran untuk konsumsi barang dan jasa, maka makin tinggi tingkat kesejahteraan keluarga tersebut. Seiring dengan berkembangnya jaman, telah terjadi pergeseran dalam perilaku konsumsi di masyarakat. Pergeseran pola pengeluaran konsumsi rumah tangga dari makanan ke non makanan dapat dijadikan indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan anggapan bahwa setelah kebutuhan makanan terpenuhi, kelebihan pendapatan akan digunakan untuk konsumsi non makanan.

SUMBER DATA DAN METODOLOGI

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa pengeluaran perkapita Jawa Tengah tahun 2005, 2008, 2011, 2012, dan 2013, serta penduduk miskin menurut kabupaten di Jawa Tengah tahun 2012. Metode analisis yang digunakan adalah

analisis deskriptif kuantitatif dengan menghitung nilai uji koefisien korelasi *rank Spearman*.

Teori Konsumsi.

Menurut Mankiw (2000) "Konsumsi adalah barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga, konsumsi terdiri dari barang tidak tahan lama (*non durable goods*) adalah barang yang habis dipakai dalam waktu pendek, seperti makanan dan pakaian. Kedua adalah barang tahan lama (*durable goods*) adalah barang yang memiliki usia panjang seperti mobil, televisi, alat-alat elektronik, ponsel, dan lainnya. Ketiga, jasa (*services*) meliputi pekerjaan yang dilakukan untuk konsumen oleh individu dan perusahaan seperti potong rambut dan berobat ke dokter.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.

Sukirno dalam Julian (2016) menyebutkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah nilai belanja yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhannya dalam satu tahun tertentu. Pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk membeli makanan, membiayai jasa angkutan, membayar pendidikan anak, membayar sewa rumah, dan membeli kendaraan. Barang-barang tersebut dibeli rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya, dan pembelanjaan tersebut dinamakan konsumsi.

Konsep Kebutuhan Dasar.

Kebutuhan dasar merupakan kebutuhan yang sangat penting guna kelangsungan hidup manusia, baik yang terdiri dari kebutuhan atau konsumsi individu maupun kebutuhan pelayanan social. Adapun kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat adanya. Pada tingkat pertama (*primary needs*) atau kebutuhan primer orang membutuhkan sandang, pangan, papan. Apabila kebutuhan primer ini sudah terpenuhi, maka muncullah dalam pikiran manusia untuk memenuhi kebutuhan tingkat kedua (*secondary needs*) yang merupakan kebutuhan akan barang-barang perlu, yang antara lain berupa kebutuhan akan sepatu, pendidikan dan sebagainya. Jika keadaan memungkinkan (bertambah kaya) muncul keinginan untuk memenuhi kebutuhan tingkat ketiga (*tertiary needs*) yang berisi kebutuhan akan barang mewah, dan kebutuhan keempat (*quartary needs*) yang berisi akan kebutuhan barang-barang yang benar-benar mubadzir (yang tidak diperlukan sama sekali) dan seterusnya.

Konsep Kemiskinan.

BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun nonmakanan yang bersifat mendasar. Pengukurannya dilakukan dengan menghitung pengeluaran kebutuhan makanan dan kebutuhan non makanan per kapita per bulan. Singkatnya penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran (makanan dan non makanan) perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Teori Engel.

Menurut Meiler dan Meineres dalam Meri Lawani (2012), sebagai pelopor dalam penelitian tentang pengeluaran rumah tangga. Penelitian Engel melahirkan empat butir kesimpulan yang dikenal dengan hukum Engel, yaitu: (1) Jika pendapatan meningkat, maka persentase pengeluaran untuk konsumsi pangan semakin mengecil. (2) Persentase pengeluaran untuk konsumsi pakaian relative tetap dan tidak tergantung pada tingkat pendapatan. (3) Persentase pengeluaran konsumsi untuk pengeluaran rumah relatif tetap dan tidak tergantung pada tingkat pendapatan. (4) Jika pendapatan meningkat, maka persentase pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, rekreasi, barang mewah, dan tabungan semakin meningkat.

Metode Analisis.

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, dengan lebih banyak menggunakan pendekatan grafis. Hal tersebut dikarenakan lebih mudah untuk melihat pola atau kecenderungan dari unit pengamatan dan membuat perbandingan diantara unit pengamatan. Bentuk analisis yang dilakukan dalam studi ini adalah Analisis Tren dan *Scatter Diagram*.

Analisis tren adalah teknik pengumpulan informasi yang bertujuan untuk menemukan pola, atau tren, dalam informasi tersebut. Dalam beberapa bidang studi, istilah "analisis tren" telah didefinisikan lebih formal. Meskipun analisis tren/analisa kecenderungan sering digunakan untuk memprediksi kejadian masa depan, namun analisa tersebut juga bisa digunakan untuk

memperkirakan kejadian yang tidak pasti di masa lalu.

Pemilihan strategi analisis data tren tergantung sebagian pada tujuan analisis, dan pertimbangan terhadap masalah yang dibahas. Setelah terdapat kerangka konseptual, tabel; grafik; dan analisis statistik adalah alat untuk memeriksa dan menganalisis data tren. Grafik khususnya, merupakan alat yang efektif untuk menyajikan pola perubahan dari waktu ke waktu (Rossenberg, 1997).

Sedangkan untuk mengetahui hubungan antara jumlah penduduk miskin suatu daerah dengan konsumsi perkapita di daerah tersebut akan digunakan analisis peringkat Spearman (*rank Spearman*). Pemilihan analisis *rank Spearman* ini dinilai paling tepat untuk menguji korelasi variabel X dan Y. Koefisien korelasi peringkat Spearman, r_s , adalah ukuran erat tidaknya kaitan antara dua variable ordinal; artinya, r_s merupakan ukuran atas kadar/derajat hubungan antara data yang telah disusun menurut peringkat (*ranked data*). Koefisien Spearman dihitung dengan menggunakan nilai peringkat untuk X dan Y. (J.Supranto, 1988: 337).

HASIL DAN DISKUSI

1. Analisis Deskriptif.

Konsumsi rumah tangga dalam survei yang dilakukan oleh BPS pada kegiatan susenas dibedakan atas kelompok makanan dan non makanan sehingga dapat digunakan untuk melihat pola pengeluaran penduduk. Pada kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas utama, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan maka secara perlahan akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk non makanan.

Tabel 1. Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Tiap Bulan untuk Makanan dan Non Makanan Daerah Perdesaan di Jawa Tengah

Tahun	Makanan	Non Makanan
Perdesaan		

2005	57,36	42,64
2008	59,72	40,28
2011	54,53	45,47
2012	53,73	46,27
2013	54,61	45,39
Perkotaan		
2005	48,91	51,09
2008	52,16	47,84
2011	46,90	53,10
2012	47,80	52,20
2013	45,66	54,34

Sumber : BPS, Susenas

Tabel 1 menunjukkan bahwa persentase makanan di perdesaan lebih besar dibandingkan daerah perkotaan. Sebaliknya, persentase pengeluaran non makanan lebih tinggi di perkotaan. Hal ini mengindikasikan bahwa perkotaan mempunyai kecenderungan yang lebih besar pada kebutuhan sekunder/tersier (non makanan) dibanding perdesaan.

Rata-rata pendapatan per kapita sebulan sangat mempengaruhi pengeluaran pembelian makanan maupun non makanan pada tiap daerah. Di Kabupaten Cilacap, peningkatan rata-rata pendapatan perkapita sebulan dari tahun ke tahun sangat berpengaruh pada menurunnya porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk non makanan, terbukti pada tahun 2005 rata-rata pendapatan perkapita sebulan hanya 190,762, pengeluaran untuk makanan sebesar 56,49 persen dan non makanan sebesar 43,51persen. Sedangkan peningkatan pendapatan perkapita sebulan yang terjadi pada tahun 2008 sebesar 262,661, menyebabkan pengeluaran pembelajaran makanan sebesar 56,25 persen, non makanan 43,75 persen dan terus akan meningkat pada tahun 2011 dan 2012. Daerah lain yang mempunyai persamaan dengan Kabupaten Cilacap yaitu Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Karanganyar, Sragen, Grobogan, dan Boyolali. Di Kabupaten Purworejo, walaupun rata-rata pendapatan perkapita pada tahun 2011 sebesar 479,418, pada tahun 2012 menurun menjadi 470,637, tetapi hal ini tetap membuat masyarakat menurunkan anggaran untuk pembelajaran makanan dan meningkatkan pembelajaran non makanan disetiap tahunnya.

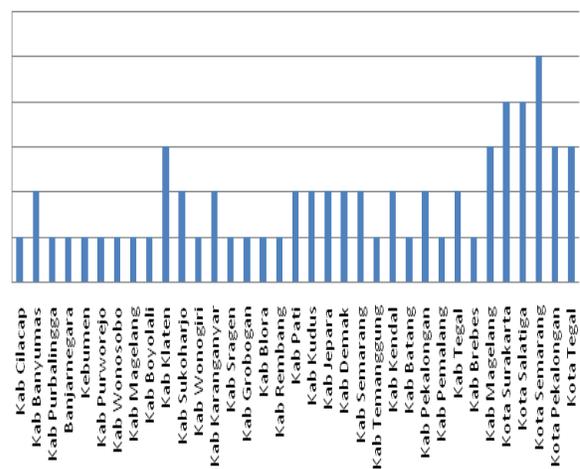
Kabupaten Purbalingga dapat dinyatakan berbanding terbalik dengan daerah tersebut, karena di daerah ini peningkatan rata-rata pendapatan perkapita sebulan, mempengaruhi peningkatan pembelanjaan makanan dan menurunnya pembelanjaan non-makanan. Berbeda juga di daerah-daerah lain seperti, Banyumas, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Rembang, Blora, Pati, dan Kudus yang mempunyai rata-rata pendapatan perkapita sebulannya selalu meningkat, tetapi untuk pembelanjaan makanan – non makanan masih tidak menentu, bisa mengalami peningkatan maupun penurunan pada tahun tertentu.

Di daerah Banyumas, pada tahun 2005 hingga 2011, pembelanjaan untuk makanan menurun dan non makanan meningkat, namun pada tahun 2012 menjadi berkebalikan karena pembelanjaan makanan meningkat sebesar 50,08 persen dan non makanan menurun menjadi 49,92 persen. Di Klaten rata-rata pendapatan perkapita tiap bulan yang terus meningkat, namun pada tahun 2008 anggaran pembelanjaan makanan mengalami penurunan sebesar 49,67 persen dan penurunan non makanan pada tahun 2011 sebesar 48,7 persen yang sebelumnya pada tahun 2008 sebesar 49,67 persen kemudian meningkat lagi pada tahun 2012 sebesar 48,89 persen. Di Sukoharjo pada tahun 2011, anggaran pembelanjaan makanan mengalami penurunan sebesar 45,94 persen serta diikuti pula penurunan anggaran pembelanjaan non-makanan pada tahun 2012 menjadi 51,91 persen dari 54,06 persen. Sedangkan terjadi hal yang sama di Kabupaten Wonogiri yang mengalami penurunan anggaran pembelanjaan makanan hanya pada tahun 2008 yaitu 51,89 persen dan juga merasakan penurunan anggaran pembelanjaan non makanan pada tahun 2012 yaitu menjadi 48,25 persen yang sebelumnya pada tahun 2008 sebesar 48,11 persen dan 2011 sebesar 49,23 persen. Di Kabupaten Rembang dan Blora memiliki rata-rata pendapatan perkapita yang terus meningkat per bulan namun anggaran pembelanjaan untuk makanan maupun non makanan naik turun tidak menentu. Pada tahun 2008 pembelanjaan makanan dan minuman mengalami penurunan, tahun 2011 pembelanjaan tersebut meningkat kembali, kemudian pada tahun 2012, anggaran pengeluaran untuk pembelanjaan

makanan – non makanan mengalami penurunan kembali.

Di Kabupaten Pati, pembelanjaan makanan pada tahun 2005 sebesar 55,23 persen kemudian menurun di tahun 2008 menjadi 51,48 persen dan meningkat lagi di tahun 2011 dan 2012 yaitu sebesar 52,85 persen dan 53,78 persen. Tetapi pada kenyataannya untuk pembelanjaan non makanan nampaknya naik turun, pada tahun 2005 sebesar 44,77 persen meningkat menjadi 48,52 persen pada tahun 2008, namun pada tahun 2011 dan 2012 mengalami penurunan terus menerus sebesar 47,15 persen dan 46,2 persen. Anggaran pembelanjaan makanan – non makanan di daerah Kudus tidak dapat dipastikan setiap tahunnya karena pada makanan pada tahun 2008 mengalami penurunan dan tahun 2012 mulai meningkat kembali, begitu pula dengan anggaran pembelanjaan non makanan meningkat pada tahun 2011 sebesar 55,61 persen yang sebelumnya hanya 46,86 persen kemudian menurun lagi pada tahun 2012 menjadi 51,86 persen.

Grafik 1. Pengeluaran Per Kapita Penduduk Jawa Tengah Tahun 2005

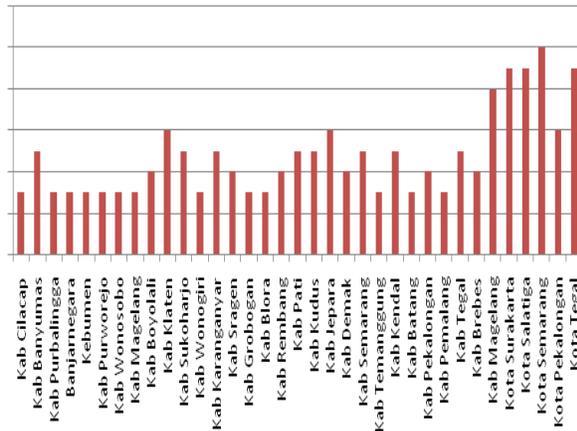


Sumber : BPS, Susenas

Grafik 1 menunjukkan bahwa Kabupaten Semarang selama tahun 2005 mencapai pengeluaran perkapita terbesar yakni termasuk wilayah yang memiliki pengeluaran perkapita per bulan mencapai lebih dari 350.000 sampai dengan 400.000 rupiah, dan diikuti oleh Kota Salatiga dan Kota Surakarta. Sedangkan Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal merupakan kelompok pengeluaran ketiga

terbesar di Provinsi Jawa Tengah yakni pengeluaran perkapita penduduknya antara 250.000 sampai dengan 300.000 rupiah. Sedangkan Pengeluaran terkecil meliputi banyak kabupaten yakni wilayah dengan pengeluaran per kapita sebesar 150.000 sampai dengan 200.000 rupiah.

Grafik 2. Pengeluaran Per Kapita Penduduk Jawa Tengah Tahun 2008

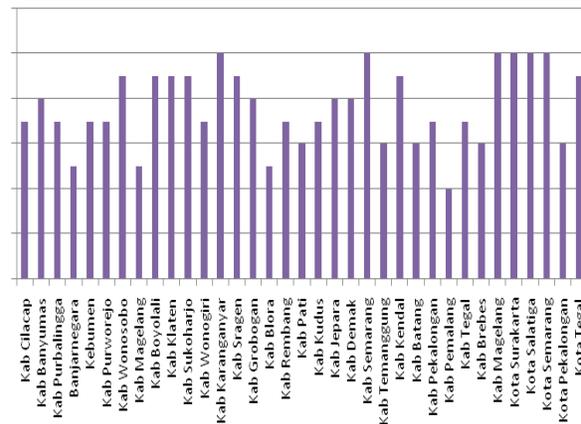


Sumber : BPS, Susenas

Berbeda dengan grafik sebelumnya pada tahun 2008 ini jelas terlihat bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini ditunjukkan dengan grafik di atas, bahwa pengeluaran perkapita penduduk di tahun ini paling kecil berada di garis horisontal 3, atau dengan kata lain bahwa pengeluaran per kapita penduduk secara umum di kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah antara 250.000 sampai dengan 300.000 rupiah. Sedangkan Pengeluaran perkapita penduduk terbesar masih berada di Kota Semarang dan mencapai garis horisontal 10, artinya pengeluaran perkapita penduduk di wilayah ini lebih dari 600.000 rupiah. Sedangkan untuk pengeluaran yang pada tahun 2005 terbesar di garis horizontal 5 dan hanya pada kota Semarang, maka pada tahun 2008 ini ada beberapa kabupaten yang memiliki pengeluaran perkapita di garis ini, yakni Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar Kabupaten Kudus, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Tegal. Sedangkan peringkat kedua dengan pengeluaran di garis horisontal 9, terbesar ada di tiga kabupaten,

yakni Kota Surakarta, Kota Salatiga, dan Kota Tegal, adapun Kota Tegal sebelumnya (tahun 2005), baru mencapai garis horisontal 3. Hal ini tentu menunjukkan bahwa Kabupaten Tegal dengan perkembangan yang pesat mampu mengejar ketertinggalannya dengan kota lainnya, bahkan meninggalkan Kota Pekalongan yang pada tahun 2005 sama-sama berada di garis horisontal 3.

Grafik 3. Pengeluaran Perkapita Penduduk Jawa Tengah Tahun 2012



Sumber : BPS, Susenas 2012

Grafik 3 memberikan informasi bahwa kemajuan yang signifikan hampir terjadi di semua kabupaten. Dari grafik di atas terlihat bahwa ada 2 kabupaten yang menyusul di garis 10, yakni Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Semarang. Hal ini dimungkinkan karena pembangunan di kedua daerah tersebut akhir-akhir ini cukup pesat dan berdekatan dengan kabupaten yang memiliki tingkat kesibukan yang cukup padat. Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, dan Kota Semarang, masih berada digaris 10, sedangkan Kota Tegal turun setingkat berada di garis 9. Sedangkan Kabupaten Pemalang dibandingkan dengan tahun 2011 masih berada digaris 4 dengan pengeluaran 300.000 sampai dengan 350.000 rupiah dan merupakan kabupaten dengan pengeluaran terkecil di Provinsi Jawa Tengah di Tahun 2012

2. Analisis Rank Spearman.

Penduduk miskin tahun 2012 menunjukkan bahwa Kabupaten Wonosobo, Kebumen, Rembang, Brebes, dan Purbalingga merupakan kabupaten

dengan jumlah penduduk terbesar di Jawa Tengah yaitu diatas 20 persen. Sedangkan Kota Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Kudus merupakan tiga kabupaten/kota dengan penduduk miskin terendah di Jawa Tengah.

Kota Semarang dengan jumlah penduduk miskin terendah mempunyai konsumsi perkapita sebesar Rp. 760.649, masih lebih rendah dibandingkan Kota Salatiga dan Kota Magelang. Walaupun Kabupaten Wonosobo merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar, namun konsumsi perkapitanya masih tetap tinggi sebesar Rp. 552.525. Hal ini sesuai dengan teori James Dussenberry dalam Kamaludin (2009) menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi seseorang bukan tergantung pada pendapatan absolut aktualnya tetapi tergantung dari pendapatan relatifnya. Dengan kata lain orang dengan pendapatan yang tinggi tidak akan menurunkan pengeluaran konsumsinya sekalipun pendapatannya menurun.

Tabel 4. Persentase Penduduk Miskin dan Konsumsi Perkapita Tahun 2012

Kabupaten	Penduduk Miskin (%)	Konsumsi perkapita (Rp)
1	15,92	464.011
2	19,44	500.050
3	21,19	465.080
4	18,87	382.286
5	22,4	458.025
6	16,32	470.637
7	22,5	552.525
8	13,97	372.410
9	13,88	566.722
10	16,71	556.939
11	10,15	583.952
12	14,67	459.558
13	14,07	643.036
14	16,72	554.822
15	16,13	500.564
16	15,1	399.226
17	21,88	472.521
18	13,61	438.309
19	8,63	488.491
20	9,38	528.983
21	16,73	503.444
22	9,4	661.908
23	12,32	419.670
24	13,17	582.351

25	12,4	432.758
26	13,85	485.938
27	19,27	333.656
28	10,75	492.396
29	21,12	448.398
71	10,31	822.561
72	12	685.221
73	7,11	926.617
74	5,13	760.649
75	9,47	442.725
76	10,04	564.128

Sumber : BPS, 2013

Untuk mengetahui hubungan antara jumlah penduduk miskin dan konsumsi perkapita maka dilakukan uji koefisien korelasi peringkat Spearman (r_s).

Tabel 5. Uji Nonparametric Correlations

Spearman's rho	Standar Miskin	Standar Konsumsi	Signifikansi
Standar Miskin	0,000	0,013	Tolak Ho pada tingkat $\alpha = 5\%$
Standar Konsumsi	0,013	0,000	Tolak Ho pada tingkat $\alpha = 5\%$

Pada tingkat signifikansi α sebesar 5% maka disimpulkan bahwa hasil uji koefisien korelasi peringkat Spearman (r_s) menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara persentase penduduk miskin dengan konsumsi perkapita penduduk seperti ditunjukkan pada Tabel 4.1. Peningkatan jumlah penduduk miskin suatu daerah yang bergerak lebih cepat dari daerah lainnya, maka dimungkinkan akan mengurangi konsumsi perkapita daerah tersebut.

KESIMPULAN

1. Rata-rata pola konsumsi daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan, dengan persentase konsumsi makanan di daerah perkotaan lebih rendah (kurang dari 50 persen). Hal ini menunjukkan bahwa daerah perkotaan mempunyai kecenderungan yang lebih besar pada kebutuhan sekunder/tersier dibandingkan daerah perdesaan.
2. Terjadi peningkatan pengeluaran perkapita yang cukup tajam dengan pengeluaran perkapita tertinggi di Kota Salatiga sebesar

926.617 dan terendah di Kabupaten Pemalang sebesar 333.656 di tahun 2012.

3. Berdasarkan hasil uji koefisien korelasi *spearman* (r_s) menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara persentase penduduk miskin dengan konsumsi perkapita penduduk. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi konsumsi suatu wilayah maka diasumsikan semakin makmur penduduk wilayah tersebut (pedapatan tinggi).

DAFTAR PUSTAKA/RUJUKAN

- Ariani dan Purwantini. 2006. "Analisis Konsumsi Pangan Rumah Tangga Pasca Krisis Ekonomi di Provinsi Jawa Barat". <https://ojs.unud.ac.id/index.php/soca/article/view/4117>.isi 11 pt, Times New Roman, ditulis berurutan menurut abjad, merupakan sumber dari isi makalah
- Badan Pusat Statistik, Berbagai Tahun Terbitan. *Statistik Jawa Tengah*. www.jateng.bps.go.id, diakses tanggal 26 November 2016
- Badruddin, Syamsiah. 2009. "Kemiskinan Dan Kesenjangan Sosial Di Indonesia Pra Dan Pasca Runtuhnya Orde Baru". <https://profsyamsiah.wordpress.com/2009/04/23/49/>, diakses tanggal 27 Desember 2016
- Julian. 2016. "Pola Konsumsi Mahasiswa Indekos Di Universitas Lampung(Studi Kasus : Mahasiswa S1 Reguler Feb Unila)". <http://digilib.unila.ac.id/24791/2/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, diakses tanggal 26 Desember 2016
- Lawani, Meri. 2012. "Studi Perbandingan Pola Konsumsi Pangan dan Non Pangan Rumah Tangga Kaya dan Miskin di Kota Makassar". https://www.academia.edu/9582162/BAB_I-BAB_V, diakses tanggal 26 Desember 2016
- Lisna, Vera dan Rifai, Nila. 2009. "Analisis Faktor-faktor Ekonomi Makro Yang Mempengaruhi Tingkat Konsumsi Era Pemerintahan SBY". <http://burhan.staff.ipb.ac.id/files/2011/01/ANALISIS-FAKTOR-FAKTOR-EKONOMI-MAKRO-YANG-MEMPENGARUHI-TINGKAT-KONSUMSI-ERA-PEMERINTAHAN-SBY-JILID-I.pdf>, diakses tanggal 10 Desember 2016
- M.Fikri, Amri Amir, Erni Achmad. 2014. *Analisis Konsumsi Masyarakat Indonesia Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi*. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 1 No. 3, Januari-Maret 2014 ISSN: 2338- 4603
- Mankiw, N.Gregory, 2004. *Teori Makro Ekonomi*, Edisi Kedelapan. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Mizkat. 2005. "Konsumsi Non Pangan". <http://repository.unhas.ac.id>, diakses 10 Desember 2016
- Nanga, Muara. 2001. *Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Pratiwi. 2010. "Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Konsumsi Masyarakat Di Indonesia Periode Tahun 1979-2007". <http://eprints.ums.ac.id/7910/1/B300060009.PDF>, diakses tanggal 27 Desember 2016
- Rachman, HPS. 2001. "Kajian Pola Konsumsi dan Permintaan Pangan di Kawasan timur Indonesia". <http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/813/Bab%20III%2020001hps.pdf?sequence=11>
- Rahma, Aulia. 2011. "Studi Perbandingan Pola Konsumsi Pangan dan Non Pangan Rumah Tangga Kaya dan Miskin di Kota Makassar". <https://www.slideshare.net/cvrhmat/studi-perbandingan-pola-konsumsi-pangan-dan-non-pangan-rumah-tangga-kaya-dan-miskin-di-kota-akassar-43445627>
- Soembodo, Benny. "Pandangan Masyarakat Miskin Perkotaan Mengenai Kesejahteraan Sosial". https://www.academia.edu/11678737/ccontoh_jurnal_kemiskinan_oleh_Benny. Diakses tanggal 27 Desember 2016
- Sukirno, Sadono. 2013. *Makroekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, Rajawali Press, 2013.
- Supranto. 2000. *Statistik, Teori dan Aplikasi*. Edisi Keenam. Erlangga: Jakarta